

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan praktik dan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di Indonesia dilatarbelakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktik dan pengungkapan CSR. Rahmawati (2012:184) menyatakan sejak tanggal 23 september 2007, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility disclosure*) mulai diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang hidup dari ekstraksi sumber daya alam. Dalam Pasal 24 Undang-Undang tersebut diatur tentang kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga, tidak ada lagi sebutan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility disclosure*) yang sukarela, namun pengungkapan yang wajib hukumnya. Perkembangan CSR di luar negeri sudah sangat populer, bahkan di beberapa Negara. CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan dengan dicantumkannya informasi CSR di dalam catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pasal 66 dan 74. Pada pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara itu, di dalam pasal 74 dinyatakan bahwa

kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan (UU PT. 2007).

Corporate social responsibility merupakan tanggung jawab sosial atau sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan (Sudana 2011:10). CSR diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. Laporan tersebut merupakan pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh, serta kinerja organisasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. *Sustainability Reporting* harus menjadi dokumen strategis yang berlevel tinggi, yang menempatkan isu, tantangan, dan peluang *Sustainability Development* menuju kepada *core business* perusahaan (Hery, 2012:140).

Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi di luar persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Setiap unit atau pelaku ekonomi selain berusaha memenuhi kepentingan pemegang saham dan mengonsentrasikan diri pada pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan. Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat

sukarela (*voluntary*), belum diaudit (*unaudited*), dan tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu (*unregulated*).

Corporate social responsibility dilatarbelakangi masih rendahnya kualitas dan kuantitas pengungkapan informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan lingkungan perusahaan di Indonesia. Faktanya di Indonesia banyak kasus yang berhubungan dengan CSR. Berikut adalah beberapa fenomena, diantaranya sebagai berikut:

Kawasan Industri Jababeka di Cikarang, Jawa Barat, tidak mengabaikan warga yang tinggal di sekitarnya. Sebab menjadi ironi, jika di samping Kawasan Industri besar dan pemukiman yang mewah, ada warga yang hidup penuh keterbatasan dan justru menanggung dampak negatif dari keberadaan 'Kawasan Elit' tersebut. Namun, perusahaan di kawasan Jababeka tidak maksimal menjalankan program *corporate social responsibility* (CSR) kepada warga. Bahkan ada yang mengalami dampak negatif, seperti banjir yang menunjukkan bahwa tidak adanya perhatian bagi warga sekitar. Seharusnya dengan ribuan perusahaan yang berada di daerah tersebut, warga di daerah sekitar mendapatkan manfaat. Baik pembangunan sarana prasarana dan kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan (www.metrotvnews.com, diposting pada: 12 Januari 2015, diakses pada 27 Juni 2015 pukul 08.37 WIB)

Massa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, melakukan demonstrasi di Makassar terkait dana *Corporate Social Responsibility* PT Semen Tonasa. PT Semen Tonasa tidak transparan kepada masyarakat sebab masyarakat sekitar tidak

mengetahui adanya anggaran yang digelontorkan untuk pengelolaan CSR. Masyarakat hari ini hampir tidak menikmati dana tersebut. Masyarakat hanya mendapatkan setiap harinya hujan debu, asap tebal dan kebisingan saat pabrik beroperasi. Ia bahkan menuding pihak PT Semen Tonasa menggelontorkan dana CSR tersebut hanya kepada kalangan para keluarga pegawai perusahaan, sehingga keberpihakan perusahaan perlu dipertanyakan. Seharusnya dua persen dari laba bersih perusahaan disalurkan ke masyarakat. Untuk itu kami mendesak kepada pimpinan, direksi PT Semen Tonasa untuk mengoptimalkan dana CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan (www.republika.co.id, diposting pada: 22 Juni 2011, diakses pada 15 Juni 2015 pukul 12.30 WIB).

Banyak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lebak, Banten, baik perusahaan swasta maupun BUMN yang tidak mengalokasikan dana *corporate social responsibility* (CSR) mereka di Kabupaten Lebak. Perusahaan di Kabupaten Lebak tidak mengungkapkan program CSR-nya dengan transparan dan tepat sasaran. Selain itu, sejumlah perusahaan juga dituding mempersulit warga yang berada disekitar perusahaan. Dana CSR dari Perusahaan swasta atau BUMN yang ada di Kabupaten Lebak tidak menyentuh masyarakat karena untuk mendapatkan dana CSR, masyarakat dipersulit dengan berbagai alasan. Jika sejumlah perusahaan tersebut menyalurkan dan mengalokasikan dana CSR-nya dengan transparan dapat membantu perbaikan sejumlah jembatan gantung yang kini nyaris roboh (www.indopos.co.id, diposting pada: 6 Mei 2015, diakses pada 27 Juni 2015 pukul 12.57 WIB).

PT BPL merupakan salah satu dari enam perusahaan perkebunan sawit yang memiliki hak guna usaha (HGU) seluas 12.992 hektare dan sudah sekitar 20 tahun beroperasi di Kabupaten Bangka Barat. Sampai saat ini sama sekali tidak adanya pengungkapan kewajiban program kemitraan dengan warga di sekitarnya seperti program revitalisasi, plasma, kepedulian perusahaan terhadap masyarakat atau *corporate social responsibility* (CSR) belum pernah dilakukan karena kantor perwakilan yang berada di Kota Pangkalpinang tidak ada pegawai yang bisa menentukan kebijakan langsung di lapangan, semua keputusan harus menunggu jawaban dari kantor pusat yang berada di Jakarta. Tindakan arogan yang ditunjukkan manajemen PT BPL tersebut seharusnya sudah diberi sanksi tegas karena belum ada kontribusi positif bagi warga sekitarnya (www.antaraneews.com, diposting pada: 20 Februari 2013, diakses pada 27 Juni 2015 pukul 13.06 WIB).

Peristiwa longsor yang menewaskan empat orang karyawan PT Freeport menjadi petunjuk bahwa lingkungan di sekitar lokasi tambang sudah dalam keadaan kritis. Hal ini sekaligus membuktikan tidak adanya upaya CSR dari perusahaan terhadap alam yang dirusak oleh aktivitas pertambangan mereka dan tidak memperhatikan para pekerja. Hampir semua pekerja yang berada di tempat kecelakaan masih berstatus dalam pelatihan. Ini jelas menyalahi prosedur ketenagakerjaan (www.republika.co.id, diposting pada: 15 Mei 2015, diakses pada 27 Juni 2015 pukul 12.40 WIB).

Terjadinya fenomena di atas terlihat bahwa memang pencemaran lingkungan banyak dilakukan oleh perusahaan yang memang dilatar belakangi oleh kegiatan mereka dalam memanfaatkan alam, dan perusahaan-perusahaan di

Indonesia belum mampu secara optimal melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan. Tetapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mewajibkan perusahaan dari sektor lain melakukan kegiatan tanggung jawab sosial korporatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi *corporate social responsibility disclosure* dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Corporate Social Responsibility Disclosure*

No	Peneliti dan Tahun	Manajemen Laba	Mekanisme <i>Corporate Governance</i>								Ukuran Perusahaan	Profitabilitas	Leverage	Profile
			Ukuran Dewan Komisaris	Kepemilikan Manajerial	Proporsi Dewan Komisaris Independen	Kepemilikan Instusional	Ukuran Komite Audit	Jumlah Rapat Komite Audit	Dewan Direksi	Komposisi Dewan Direktur Independen				
1.	Eddy Rismanda Sembiring (2005)	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	x	x	✓
2.	Inayah dan Anies (2010)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	✓	-	x	-
3.	Riha dan Ade (2011)	-	✓	✓	✓	x	x	-	-	-	-	-	-	-
4.	Muhammad Titan Terzaghi (2012)	x	✓	x	-	x	x	-	-	x	-	-	-	-
5.	Tita Djuitaningsih (2012)	x	x	x	x	x	x	✓	-	-	-	-	-	-
6.	Ira Robiah Adawiyah (2013)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	✓	-
7.	Megawati Holly Devianti (2013)	-	-	-	-	-	x	-	x	-	✓	x	x	-

Keterangan: tanda ✓ = Berpengaruh
tanda x = Tidak Berpengaruh
tanda - = Tidak diteliti

Berdasarkan tabel 1.1 penulis akan meneliti 5 (lima) faktor yang mempengaruhi *corporate social responsibility disclosure*, yaitu ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Karena kelima faktor tersebut belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang konsisten atau signifikan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya.

Dalam pengambilan keputusan investasi, investor seringkali melihat besar kecilnya perusahaan dan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2008:313). Perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurang biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berukuran lebih kecil.

Ukuran perusahaan juga merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan. Menurut (Yogiyanto, 2007:282) ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil.

Selain ukuran perusahaan, investor juga akan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan sebelum membuat keputusan investasinya. Kinerja keuangan yang sering kali dilihat adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau yang sering dikenal dengan *leverage* perusahaan.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) (Kasmir, 2013:151). Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Tingkat *leverage* perusahaan, dengan demikian menggambarkan resiko keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage* besar kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba yang lebih tinggi dengan cara mengurangi biaya-biaya termasuk biaya pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Tita Djuitaningsih (2012) dengan judul Pengaruh Manajemen Laba dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Variabel yang diteliti yaitu manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* sebagai variabel independen, serta *corporate social responsibility*

disclosure sebagai variabel dependen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tita Djuitaningsih (2012) yaitu 1) Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap *corporate social responsibility disclosure*; 2) Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*; 3) Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*; 4) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*; 5) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*; 6) Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*; 7) Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis hanya menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris independen, menambahkan variabel ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel independen, dan menghapuskan variabel manajemen laba sebagai variabel independen dari penelitian sebelumnya, selain itu adanya penambahan periode penelitian, pada penelitian sebelumnya data yang digunakan pada perusahaan non-keuangan manufaktur hanya periode 2008-2010, sedangkan penelitian ini data yang digunakannya pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* periode 2010-2014.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana ukuran dewan komisaris pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
2. Bagaimana kepemilikan manajerial pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
3. Bagaimana proporsi dewan komisaris independen pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
4. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
5. Bagaimana *leverage* pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
6. Bagaimana *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.

7. Seberapa besar pengaruh ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *corporate social responsibility disclosure* secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
8. Seberapa besar pengaruh ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *corporate social responsibility disclosure* secara simultan pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ukuran dewan komisaris pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
2. Untuk mengetahui kepemilikan manajerial pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
3. Untuk mengetahui proporsi dewan komisaris independen pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
4. Untuk mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.

5. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
6. Untuk mengetahui *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *corporate social responsibility disclosure* secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *corporate social responsibility disclosure* secara simultan pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

terhadap pengembangan ilmu akuntansi di bidang keuangan khususnya mengenai *corporate social responsibility disclosure*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, *leverage* dengan *corporate social responsibility disclosure*, dan sebagai sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama di bangku kuliah.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, *leverage* dengan *corporate social responsibility disclosure*.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Bursa Efek Indonesia Jl. Veteran No.10 Bandung dan waktu penelitiannya dilakukan pada bulan April 2015, sumber data dari *Indonesian Stock Exchange* (www.idx.co.id).